

---

## Teori Barang Publik Yang Sulit Diimplementasikan

Indra Wirawijaya

STIE Syariah Al-Mujaddid, Tanjung Jabung Timur

[indrawirawijaya011@gmail.com](mailto:indrawirawijaya011@gmail.com)

### Abstrak

Barang publik bisa disebut barang kolektif karena dapat dikonsumsi individu secara berkala dan dapat dikonsumsi atau dinikmati oleh siapa saja. Barang publik merupakan barang yang tidak disediakan pasar dengan penjual dan pembeli di dalamnya. Barang publik disediakan oleh pemerintah karena barang publik tidak hanya dinikmati oleh individu tetapi juga oleh banyak masyarakat. Barang publik adalah barang yang dikonsumsi individu tetapi tidak mengurangi jumlah konsumsi oleh individu lainnya. Barang publik tidak dikecualikan siapa saja yang bisa memakai atau mengkonsumsinya dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengkonsumsinya.

**Kata Kunci:** *Teori barang, Publik, implementasi*

---

### PENDAHULUAN

Secara umum barang publik biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunaannya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang publik memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Ini berarti konsumsi atas barang tersebut oleh satu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya dan non-eksklusif berarti semua orang berhak menikmati manfaat dari barang tersebut. Contoh barang publik ini diantaranya udara, cahaya matahari, papan marka jalan, lampu lalu lintas, pertahanan nasional, pemerintahan dan sebagainya. Akan sulit untuk menentukan siapa saja yang boleh menggunakan papan marka jalan misalnya, karena keberadaannya memang untuk konsumsi semua orang. Barang publik (public goods) adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut (Tamana, 2018). Barang publik sempurna (pure public goods) adalah barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Barang publik hampir sama dengan barang kolektif. Bedanya, barang publik adalah untuk masyarakat secara umum (keseluruhan), sementara barang kolektif dimiliki oleh satu bagian dari masyarakat (satu komunitas yang lebih kecil) dan hanya berhak digunakan secara umum oleh komunitas tersebut.

### LANDASAN TEORI

#### 1. Teori Barang Publik Menurut Erick Lindhal

Teori Erick Lindahl ini di dasarkan pada analisis kurva indifferens dengan anggaran tetap yang terbatas. Kurva indifferens mempunyai bentuk melengkung ke atas yang didasarkan pada asumsi bahwa semua individu suka pada barang publik, tetapi kurang suka untuk membayar penyediaan barang publik. Guna mendapatkan kurva permintaan individu akan barang publik dapat dilakukan dengan menentukan kepuasan maksimum setiap individu pada setiap proporsi biaya. Menurut Lindahl, titik keseimbangan yang optimal dalam penyediaan 38 barang publik adalah dimana ketika biaya yang dikeluarkan sama dengan pembayaran yang diterima dari setiap masing – masing individu. Teori Erik Lindahl merupakan teori yang sangat berguna untuk membahas penyediaan barang publik yang optimum dan secara bersamaan juga membahas mengenai alokasi pembiayaan barang publik antar anggota masyarakat (Zainul, 2019). Kelemahan dari teori Lindahl adalah teori ini hanya membahas mengenai penyediaan barang publik tanpa membahas mengenai penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh sektor swasta. Sehingga pada teori ini hanya dilihat penyediaan barang publik tanpa memperhitungkan jumlah barang swasta yang seharusnya diproduksi agar masyarakat mencapai kesejahteraan yang optimal.

## **2. Teori Barang Publik Menurut Teori Samuelson**

Samuelson menyatakan bahwa adanya barang yang mempunyai dua karakteristik, yaitu; non perekonomian tidak dapat mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal. publik berbanding barang swasta. R sebagai patokan kesejahteraan. sebanyak L1, maka barang swasta yang t indifferen LR1 dapat diketahui jika R akan mengkonsumsi barang swasta sebanyak T2. Sehingga sisa barang yang ada yakni T1 Dengan asumsi yang sama jika barang publik yang tersedia adala maka R akan mengkonsumsi barang swasta sebanyak T5 dan S akan mengkonsumsi sebanyak T4 - T5 = T6. Samuelson menyatakan bahwa adanya barang yang mempunyai dua karakteristik, yaitu; non-exclusionary dan non-rivalry, tidaklah berarti bahwa perekonomian tidak dapat mencapai kondisi Pareto Optimal atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal (Ramadhani & Setiawan, 2019).

Samuelson menunjukkan tercapainya kondisi Pareto optimal akan tetapi kita tidak tahu apakah perpindahan dari D ke W pada diagram diatas menunjukkan perbaikan atau penurunan kesejahteraan seluruh masyarakat. Kelemahan yang terbesar adalah pada anggapan bahwa konsumen secara terus terang mengemukakan kesukaan mereka terhadap barang publik dan kesukaan mereka inilah yang menjadi dasar pengenaan biaya untuk menghasilkan barang publik (Oktaliza., Ahyaruddin & Putri, 2020). Yang menjadi persoalan dalam penentuan jumlah barang publik yang akan disediakan oleh pemerintah adalah bagaimana pemerintah memungut pembayaran dari konsumen barang publik (Sofyan & Barlian, 2021). Barang publik yang dibahas adalah barang yang mempunyai sifat kebersamaan, yaitu barang publik yang dipakai oleh konsumen dalam jumlah yang sama.

## **3. Teori Anggaran**

Teori Anggaran Teori ini didasarkan pada suatu analisa di mana setiap orang membayar atas penggunaan barang-barang publik dengan jumlah yang sama, yaitu sesuai dengan sistem harga untuk barang-barang swasta. Teori alokasi barang publik

melalui anggaran merupakan suatu teori analisa penyediaan barang publik yang lebih sesuai dengan kenyataan karena bertitik tolak pada distribusi pendapatan awal di antara individu-individu dalam masyarakat dan dapat digunakan untuk menentukan beban pajak di antara para konsumen untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Ikhsan & Sari, 2020).

## **METODOLOGI**

Metodologi Penelitian ini menggunakan metode Studi pustaka Dilakukan dengan cara mempelajari referensi-referensi buku, artikel, dan browsing internet, serta literature review yang berhubungan dengan topik. Pengumpulan data dengan memanfaatkan daftar pustaka ini adalah agar dapat lebih mendukung objek suatu penelitian dengan melakukan perbandingan teori-teori yang sudah ada dengan praktek yang ada di lokasi sumber data.

## **PEMBAHASAN**

Dana Otonomi Khusus Ini merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah bagi Provinsi Papua dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang provinsi Aceh. Kedua wilayah ini termasuk dalam provinsi yang memiliki dana anggaran dari DOK oleh pusat. Dana penyesuaian. Dana penyesuaian adalah dana lain yang diberikan sebagai penyesuaian di kemudian hari dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Teori Erik Lindahl merupakan teori yang sangat berguna untuk membahas penyediaan barang publik yang optimum dan secara bersamaan juga membahas mengenai alokasi pembiayaan barang publik antar anggota masyarakat. Kelemahan dari teori Lindahl adalah teori ini hanya membahas mengenai penyediaan barang publik tanpa membahas mengenai penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh sektor swasta. Sehingga pada teori ini hanya dilihat penyediaan barang publik tanpa memperhitungkan jumlah barang swasta yang seharusnya diproduksi agar masyarakat mencapai kesejahteraan yang optimal.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan layanan barang publik. Walaupun barang publik tidak selalu diartikan sebagai barang yang diproduksi oleh Pemerintah, namun pada awalnya karena sifat barang publik yang unik, ia menjadi tidak mungkin dialokasikan ke dalam mekanisme pasar. Sebagai contoh sistem hukum, pertahanan nasional, pemerintahan, marka jalan, lampu lalu lintas dan sebagainya. Kemudian Negara dalam prakteknya tidak mungkin menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis karena kebijakan yang nantinya dikeluarkan harus benar-benar didasarkan respon atas public affairs dan perwujudan public needs, sehingga tidak mungkin di satu sisi mengizinkan Negara bergelut dengan kalkulasi profit karena negara tidaklah sama dengan perusahaan besar. Begitupun sebaliknya bahwa seorang pengusaha tidak bisa menjadi seorang pemberi formulasi dalam kebijakan ekonomi.

Kendala utama penyediaan barang publik oleh negara adalah masalah efisiensi dan akuntabilitas. Penyediaan barang publik oleh negara yang tidak efisien menjadi legitimasi masuknya pihak swasta untuk ikut serta dalam penyediaannya. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah sering menjadi masalah dalam penyediaan barang publik. Keterbatasan ini menyebabkan pemerintah tidak mampu menyediakan barang publik secara optimal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat (Spackman, 2002). Institusi publik di tengah masalah kelembagaan, sistem manajemen dan pengaruh politik yang ada menjadi penyebab inefisiensi dan terhambatnya optimalisasi pelayanan publik. John T. Dunlop menggambarkan sepuluh aspek organisasi manajemen publik (Lane, 1986). Aspek-aspek ini yang menjadi kendala dalam mencapai efisiensi dan produktivitas kebanyakan organisasi publik, sebagai berikut:

Dilihat dari perpektive waktu, Institusi publik di Indonesia tidak bisa melepaskan dirinya dari pengaruh politik lima tahunan. Secara praktek, target-target kegiatan yang disusun oleh beberapa institusi publik akan sulit tercapai hanya dalam tempo sesingkat itu. Sebagai contoh, agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi baru sedikit terasa efek baiknya bagi pelaksanaan birokrasi di daerah tapi sudah dibatasi oleh kalender politik lima tahunan.

Dilihat dari aspek lamanya menjabat, Kalender politik lima tahunan juga membatasi masa kerja pejabat tinggi dan pimpinan pada organisasi publik. Padahal banyak agenda-agenda reformasi yang tidak bisa dilaksanakan hanya dalam tempo lima tahun. Kendalanya bila pejabat setelahnya memiliki visi dan misi yang berbeda, maka agenda itu akan terhenti begitu saja.

Ukuran Keberhasilan: Sangat sulit menentukan indikator keberhasilan pimpinan organisasi publik. Indikator keberhasilan saat ini hanya didasarkan pada serapan anggaran, yang justru tidak sedikit masuk ke kantong-kantong individu.

Kendala Kepegawaian: Pegawai negeri lebih tidak bisa diharapkan untuk bekerja lebih efisien, produktif, dan jujur, sedangkan yang ada di pikirannya hanya bertahan hidup dengan gaji yang kecil.

Kesamaan dan Efisiensi; Di sektor publik tekanan lebih diberikan kepada peningkatan kesamaan manfaat dari suatu program publik untuk berbagai kelompok masyarakat.

Proses Publik: Sorotan yang lebih luas kepada organisasi publik baik dari masyarakat luas maupun lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman, membuat inefisiensi di organisasi publik semakin terlihat karena tidak adanya pembenahan yang dilakukan secara serius dari tahun ke tahun.

Peranan Media Massa: Organisasi publik harus senantiasa berhadapan dengan media massa yang meliput aktivitas dan melaporkan kinerjanya.

Persuasi dan Pengarahan: Pejabat publik cenderung bersikap kompromis terhadap tekanan yang saling berlawanan. Dampak Legislatif dan Judisial, Pejabat publik seringkali menerima pengawasan dari legislatif atau bahkan dipengaruhi oleh keputusan peradilan

## **KESIMPULAN**

Teori Barang Publik Menurut Erick Lindhal didasarkan pada analisis kurva indifferens dengan anggaran tetap yang terbatas. Kurva indifferens mempunyai bentuk melengkung ke atas yang didasarkan pada asumsi bahwa semua individu suka pada barang publik, tetapi kurang suka untuk membayar penyediaan barang publik. Teori Barang Publik Menurut Teori Smuelson menyatakan bahwa adanya barang yang mempunyai dua karakteristik, yaitu; non perekonomian tidak dapat mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal. Teori Anggaran Teori ini didasarkan pada suatu analisa di mana setiap orang membayar atas penggunaan barang-barang publik dengan jumlah yang sama, yaitu sesuai dengan sistem harga untuk barang-barang swasta.

## **REFERENSI:**

- Harahap, N., & Lubis, S. D. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Ikhshan, M., & Sari, V. F. (2020). Pengaruh Pengetahuan Peraturan, Komitmen Manajemen, Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 2(4), 3705-3719.
- Lane, Frederick S. 1986. *Current Issues in Public Administration (third edition)*. New York : St. Martin"s Press
- Oktaliza, Y., Ahyaruddin, M., & Putri, A. M. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 1(2), 081-090.
- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada opd provinsi sumatera barat. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI (JEA)*, 1(2), 710-726.
- Sofyan, Y., & Barlian, U. C. (2021). ANALISIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN (Suatu Kajian Praktis Dalam Pengeloaan Anggaran Pendidikan Di Sekolah Menengah Umum). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 221-239.
- Spackman, Michael. 2002. "Public-private partnerships: lessons from the British approach". *Economic Systems*. Vol. 26. Hal. 283-301.
- Surahman, mochamad Rachmad, Sudibyo Supardi. (2016). *Modul Bahan Ajar Cetak Farmasi Metodologi Penelitian*. Kementrian kesehatan Republik Indonesia.
- Tamana, N. (2018). *Akses Masyarakat Miskin terhadap Air Minum Bersih di Provinsi Jawa Timur (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)*.
- Zainul, D(2019). *Otonomi Daerah di Indonesia: Sejarah, Teori, Analisis*.